

Artikel ini termuat dalam bab terakhir buku Sri Mastuti, et.al, *Audit Gender Terhadap Anggaran*, Jakarta: CiBa, 2008.

Memperbaiki Anggaran: Kerangka untuk menilai Anggaran Responsif Gender [Rhonda Sharp & Diane Elson]¹

GRBI adalah strategi-strategi untuk menilai dan merubah proses penganggaran dan kebijakan-kebijakan sehingga belanja-belanja dan pendapatan mencerminkan perbedaan-perbedaan dan ketidakseimbangan antara perempuan dan laki-laki dalam aset pendapatan, kekuasaan pengambilan keputusan, kebutuhan pelayanan dan tanggungjawab sosial dapat teratasi. Selama dua puluh tahun terakhir, pemerintah, organisasi-organisasi non-pemerintah, organisasi-organisasi internasional, para donor, para peneliti dan aktivis akar rumput di seluruh dunia semakin menyadari betapa pentingnya peranan untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam penganggaran dalam rangka mencapai komitmen pemerintah dan internasional terhadap kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Kemudian baru-baru ini, peranan potensial penganggaran gender memiliki kontribusi terhadap pencapaian MDGs telah diakui.

Gender Budgeting pertama sekali diperkenalkan di Indonesia tahun 2000 oleh LSM Internasional yang memberikan pelatihan dan sumber daya bagi NGO di Indonesia untuk melaksanakan pekerjaan ini. Kemudian sejak itu, berbagai kegiatan di bawah payung *gender budgeting* telah dilaksanakan di tingkat kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat. Ini dibuktikan diterbitkannya dengan Keputusan Presiden No. 9/2000 dan Keputusan Menteri No. 132/2003, meskipun tidak dimaksudkan untuk memperkenalkan *gender budgeting*, telah membuat peraturan-peraturan yang dapat mendukung alokasi-alokasi anggaran yang responsif gender. Pada saat itu para donor membantu kementerian pemberdayaan perempuan untuk melaksanakan suatu pilot proyek mengenai anggaran gender di Borneo Selatan dan kabupaten Bogor di Jawa Barat, dan mengadopsi anggaran responsif gender sebagai advokasi anggaran *pro-poor* di Kabupaten Tanah Datar-Sumatera Barat, dan memberikan pelatihan kepada

¹Rhonda Sharp, Profesor Ekonomi dari University of South Australia.

Artikel ini termuat dalam bab terakhir buku Sri Mastuti, et.al, *Audit Gender Terhadap Anggaran*, Jakarta: CiBa, 2008.

pejabat pemerintah dan anggota-anggota LSM dalam menggunakan analisa dan alat anggaran gender.²

Kegiatan-kegiatan sebagaimana disebutkan di atas konsisten dengan pengalaman internasional, karena tidak ada satupun pendekatan yang dianggap sempurna dalam pendekatan *gender budgeting*. Gerakan-gerakan dalam bidang ini bervariasi baik dalam ruang lingkup, sasaran-sasaran, strategi-strategi, *entry points* terhadap anggaran, alat analisa, peserta dan politik-politik yang berkembang. Sama halnya, tidak ada alat utama untuk menilai keberhasilan anggaran gender. Hal ini sebagian disebabkan karena anggaran pemerintah dan anggaran responsif gender dapat dilihat sebagai proses berbagai permasalahan dengan substansi-substansi output yang berasal dari kegiatan-kegiatan pemerintah dan dampaknya terhadap ekonomi lebih luas terhadap masyarakat. Namun demikian yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita mengetahui kapan anggaran responsif gender tersebut berhasil. Jawabannya sangat kompleks, bukan hanya karena banyak pengalaman tetapi karena banyaknya kegiatan dan kelompok yang biasa terlibat dalam memperbaiki anggaran. Seringkali tidak mungkin memberikan anggaran sensitif gender terhadap inisiatif anggaran gender.

Bab ini akan membahas kerangka penilaian terhadap berbagai kontribusi yang dilakukan di bawah payung *gender budgeting*, yang umumnya memperbaiki anggaran dan khususnya anggaran sensitif gender. Hal ini akan diilustrasikan dengan contoh-contoh.

Mengembangkan Anggaran Responsif Gender

Di negara-negara berkembang dan di negara-negara maju, perubahan-perubahan telah diperkenalkan untuk menilai dan mengevaluasi anggaran kinerja mereka. Sayangnya sistem anggaran kinerja ini jarang sekali mencakup kriteria-kriteria kinerja yang cukup menggambarkan dan sensitif gender. Karakteristik anggaran responsif gender adalah bahwa anggaran-anggaran tersebut berusaha untuk memperbaiki hasil-hasil anggaran

²Komunikasi Email dengan Sri Mastuti, Civic Education and Budget Transparency Advocacy (CiBa), December 1, 2007.

Artikel ini termuat dalam bab terakhir buku Sri Mastuti, et.al, *Audit Gender Terhadap Anggaran*, Jakarta: CiBa, 2008.

secara umum, kesetaraan dan pemberdayaan perempuan secara khusus. Dengan berfokus pada masalah-masalah ekonomi dan sosial yang seringkali diabaikan atau kurang diperhatikan dalam anggaran konvensional, analisa kebijakan dan pengambilan keputusan. Masalah-masalah ini mencakup peranan pekerjaan yang tidak dibayar (*unpaid work*) dan dalam ekonomi keluaran-keluaran sosial, khususnya tanggung jawab yang tidak proporsional bagi perempuan untuk pekerjaan yang tidak dibayar, distribusi sumber-sumber diantara keluarga, dampak pajak dan belanja bagi perempuan miskin dan tanggungan mereka. Jika masalah-masalah tersebut di refleksikan lebih baik dalam anggaran, kita dapat mengharapkan bahwa akan terjadi perbaikan anggaran secara umum dan anggaran sensitif gender secara khusus dalam:

- Proses-proses dan prosedur
- Substansi *output* yang berasal dari kegiatan-kegiatan pemerintah
- Hasil-hasil untuk kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan pengurangan kemiskinan.

Perbaikan-perbaikan seperti itu akan mencakup statistik dan indikator-indikator, proses-proses pengambilan keputusan anggaran, belanja, pendapatan, bantuan-bantuan antar relasi. Tabel 1 menunjukkan bahwa terdapat berbagai cara bagaimana anggaran responsif gender berperan dalam kelima bidang tersebut.

Memperbaiki Statistik Dan Indikator

Di berbagai Negara GRBI telah berhasil memperbaiki ketersediaan data terpilah untuk keperluan penilaian dampak anggaran. Hal ini dapat menggunakan data yang ada (termasuk sensus dan lembaga-lembaga penelitian) dan pengumpulan data-data baru seperti; *time used data, community data*. Misalnya Departemen anggaran perempuan nasional, negara dan daerah Australia mempublikasikan dokumen-dokumen anggaran yang menggunakan data terpilah dan telah berhasil meningkatkan kesadaran pentingnya data terpilah gender dalam kebijakan dan analisa anggaran. Ditingkat nasional terdapat 14 indikator kesetaraan gender yang telah dikembangkan pada tahun 1990 -1991 dan 1991-1992 yang menghubungkan inisiatif anggaran perempuan dan monitoring agenda nasional 5 tahun untuk rencana-rencana aksi perempuan.

Artikel ini termuat dalam bab terakhir buku Sri Mastuti, et.al, *Audit Gender Terhadap Anggaran*, Jakarta: CiBa, 2008.

Statistik RMI memberikan presentasi pertama tentang sensus data terpilah bagi pejabat senior pada tahun 2003, sebagai suatu pilot proyek anggaran gender (Sharp and Vas Dev,2004). Proyek percontohan ini juga menghasilkan kajian-kajian NGO mengenai kehamilan remaja yang memberikan data baru terpilah kepada para pembuat kebijakan. Sejak kantor statistik dan perencanaan RMI menyediakan data terpilah dan websitenya, menggambarkan keberadaan sensus dan data lembaga, dan termasuk perincian-perincian dalam survei-survei baru seperti Survei Masyarakat RMI 2006.

Anggaran Gender telah berperan dalam perbaikan statistik dan indikator ketika anggaran berhasil dipadukan dengan sistem anggaran kinerja. Lebih dari satu dekade, banyak negara termasuk Indonesia telah memperkenalkan perubahan-perubahan terhadap sistem-sistem penganggaran yang mencakup pengukuran kinerja yang dapat digunakan untuk menilai dampak-dampak kegiatan pemerintah. Di beberapa negara target-target telah ditentukan untuk mengukur kemajuan pembuatan anggaran GRBI dalam pengertian *outputs* dan *outcomes* yang dapat dianggap menggerakkan, mencapai target-target harus konsisten dengan hasil-hasil anggaran responsif gender. Misalnya Pemerintah Ruanda menggabungkan input dari konsultan gender budget penganggaran kinerja.

Tabel 1:
Kerangka Penilaian GRBI

| Bidang Perbaikan | Bentuk Perbaikan |
|--|---|
| Statistik dan Indikator | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan penggunaan dan kesediaan data terpilah - Memiliki indikator-indikator yang lebih baik mengenai output dan outcome anggaran. |
| Proses-Proses Pengambilan Keputusan Anggaran | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Kapasitas perwakilan-perwakilan yang dipilih. - Melakukan penguatan advokasi NGO-NGO Perempuan mengenai masalah-masalah anggaran - Meningkatkan kepekaan gender tentang proses-proses penganggaran partisipatif. - Meningkatkan kapasitas pihak-pihak terkait dalam |

Artikel ini termuat dalam bab terakhir buku Sri Mastuti, et.al, *Audit Gender Terhadap Anggaran*, Jakarta: CiBa, 2008.

| | |
|---|--|
| | <p>anggaran untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah dengan sub-sub anggaran departemen dan lembaga.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengakui kontribusi dan biaya-biaya bagi perawatan anak-anak perempuan. |
| Sisi Belanja Anggaran- | <ul style="list-style-type: none"> - Melaporkan alokasi-alokasi dana bagi perempuan dan anak-anak perempuan. - Memberikan kesempatan pekerjaan yang sama dalam kontrak pemerintah dan melaksanakan dalam rekrutmen pemerintahan termasuk swasta. - Memperbaiki laporan mengenai program-program pengarusutamaan dimensi gender. |
| Sisi Pendapatan-Anggaran | <ul style="list-style-type: none"> - Mendesain ulang sistem perpajakan - Mendesain ulang pajak pendapatan pribadi - Mendisain pajak-pajak tidak langsung |
| <i>Bantuan-Yang Berhubungan Dengan Proses Kebijakan</i> | <ul style="list-style-type: none"> - Mengutamakan isu-isu gender dalam tinjauan-tinjauan belanja publik dan strategi-strategi pengentasan kemiskinan. - Mengutamakan sasaran-sasaran kesetaraan gender dalam proyek-proyek yang didanai bantuan dengan memasukkan gender ke dalam pembaharuan anggaran kinerja. |

Perbaikan-Perbaikan dalam Proses Pengambilan Keputusan Anggaran

GBRI dapat memperbaiki proses-proses pengambilan keputusan dalam penganggaran dengan berbagai cara, antara lain: *Pertama*, adalah dengan mengakomodasi lebih luas kepentingan masyarakat dan memperbaiki kapasitas mereka berkaitan dengan penganggaran dan pembuatan kebijakan. Politik-politik penganggaran yang mempengaruhi distribusi sumber-sumber didominasi oleh kelompok-kelompok yang kuat, termasuk organisasi keuangan nasional dan internasional, kelompok-kelompok lobi bisnis, media dan kabinet pemerintah. Kepentingan-kepentingan kelompok ini dapat dipertemukan untuk mengurangi pelayanan publik, mengurangi pemasukan pajak bagi kelompok-kelompok yang memiliki pendapatan yang tinggi dan kemudian berubah menjadi beban reproduksi sosial dan perawatan bagi perempuan. Oleh sebab itu, diperlukan aliansi strategi untuk melakukannya sehingga lebih efektif. Cara lain untuk memperbaiki anggaran dan kepekaan gender mereka adalah untuk mempermudah

Artikel ini termuat dalam bab terakhir buku Sri Mastuti, et.al, *Audit Gender Terhadap Anggaran*, Jakarta: CiBa, 2008.

penggabungan kebijakan-kebijakan dan anggaran dan untuk memadukan masalah-masalah pekerjaan yang tidak dibayar ke dalam kebijakan dan keputusan-keputusan pendanaan.

Di beberapa negara, kapasitas dari perwakilan yang dipilih untuk berpartisipasi dalam parlemen berkaitan dengan masalah-masalah anggaran sudah diperbaiki. Kelompok Anggaran NGO Uganda (*Forum for Women in Democracy*) menghasilkan rekomendasi dan kajian-kajian bagi anggota parlemen yang telah membuat isu-isu gender "*credibility and respect*" selain mereka telah mendiskusikan sebagai "*sentimental or moral issues*" (Byanyima, 2002). Di Afrika Selatan, selama beberapa tahun, isu-isu anggaran gender dipertimbangkan oleh Parlemen bekerjasama dengan *Standing Committee* mengenai Keuangan dan *Joint Monitoring Committee* tentang perbaikan Kualitas Hidup dan Status Perempuan. Komite-komite ini menggunakan *budget debates* untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai gender, meminta laporan-laporan dari para menteri dan telah melakukan pertemuan-pertemuan dengan masyarakat sipil (Govender, 2002).

Merubah anggaran guna memenuhi kebutuhan perempuan dan anak-anak yang lebih baik telah difasilitasi dengan melakukan penguatan kapasitas advokasi NGO Perempuan berkaitan dengan masalah-masalah anggaran. Partisipasi dalam GBRI memungkinkan organisasi-organisasi perempuan di Brazil untuk berperan aktif dalam pembentukan Forum Anggaran Brazilia (Brazilian Budget Forum) pada tahun 2002. Tujuan Forum ini untuk melakukan kontrol sosial terhadap belanja publik; meningkatkan kesadaran masyarakat tentang proses-proses penganggaran; meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Kesetaraan gender merupakan suatu dimensi utama dari kerja-kerja advokasi Forum (Raes, 2006).

Di berbagai negara dimana proses-proses anggaran partisipatif telah dilaksanakan, dengan meningkatnya kepekaan gender dalam anggaran partisipatif ini memperbaiki partisipasi dan hasil-hasil. Proses-proses anggaran partisipatif telah diperkenalkan di beberapa negara-negara Amerika Latin di wilayah walikota atau tingkat daerah. Pada

Artikel ini termuat dalam bab terakhir buku Sri Mastuti, et.al, *Audit Gender Terhadap Anggaran*, Jakarta: CiBa, 2008.

awalnya gagasan kesetaraan gender ini tidak begitu diperhatikan di tingkat lokal tersebut. Prakarsa Anggaran Gender telah digunakan sebagai alat memperbaiki partisipasi perempuan dan fokus pada kesetaraan gender. Di kota Peruvian, Villa El Salvador, penganggaran partisipatif dibentuk tahun 2000. Sebagai hasil prakarsa GBRI di kota ini, proses partisipasi membuat kesetaraan gender menjadi salah satu tema utama dan memperkenalkan asesmen dini terhadap gender dalam proses (Sugiyama, 2002).

Sirkular *Gender-sensitive budget* yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan kepada Lembaga-lembaga dan departemen-departemen adalah penting untuk menyatukan keputusan-keputusan penganggaran dengan kebijakan-kebijakan. Pemerintah Pakistan telah berubah ke *Medium Term Expenditure Framework* (MTEF), dimana kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan anggaran direncanakan di dalam suatu kerangka 3 tahunan. GBI mengusulkan perbaikan-perbaikan sederhana terhadap sirkular anggaran dan pendekatan MTEF untuk meningkatkan kepekaan gendernya dan perpaduan anggaran dengan kebijakan-kebijakan (Mahbud dan Budlender, 2007).

Pengakuan biaya-biaya dan kontribusi-kontribusi dari pekerja perempuan yang tidak dibayar dalam ketentuan-ketentuan pendanaan pemerintah merupakan fokus efisiensi dan kesetaraan dalam disain program-program dan pendanaan mereka. "*Peru's glass of milk program*", yang menyediakan susu untuk memperbaiki gizi anak-anak, didisain dengan prinsip-prinsip manajemen sendiri yang menggunakan begitu banyak tenaga kerja perempuan yang tidak dibayar. Untuk memperluas program tersebut kepada lebih banyak anak-anak, diperkirakan bahwa kira-kira 733.000 jam tenaga sukarela perempuan diperlukan. Jumlah ini hampir 20% dari pembiayaan program pemerintah (Pearl, 2002). Analisis ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan tentang kebijakan dan dampak-dampak program pada beban waktu perempuan serta kira-kira siapa yang membiayai program tersebut.

Artikel ini termuat dalam bab terakhir buku Sri Mastuti, et.al, *Audit Gender Terhadap Anggaran*, Jakarta: CiBa, 2008.

Perbaikan-perbaikan terhadap Sisi Belanja dari Anggaran

Anggaran Gender menghasilkan analisa-analisa yang dimaksudkan untuk memberikan pedoman terhadap perubahan belanja pemerintah berkaitan dengan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Kadang-kadang ini dapat dilakukan dengan sumber-sumber yang ada melali perbaikan alokasi belanja. Namun demikian, secara global perlunya meningkatkan belanja pemerintah ditunjukkan oleh Kajian Bank Dunia yang memperkirakan gap pembiayaan tahunan untuk melaksanakan *Millenium Development Goals* 3, target spesifik dalam bidang pendidikan dan kegiatan-kegiatan pengarusutamaan gender di negara-negara miskin mulai dari \$8,6 billion di tahun 2006 sampai 23,8 bilion di tahun 2015 (Grown, Bahadur, Hadbury dan Elson, 2006).

Sangat perlu untuk memahami besaran, *trends*, dan efektivitas target-target belanja bagi perempuan dan anak-anak perempuan untuk memperbaiki efektivitas belanja dari anggaran. Menteri Kesetaraan Gender Korea Selatan membuat suatu *white paper* mengenai perempuan yang berhubungan dengan isu-isu yang memperkenalkan konsep anggaran gender. Jumlah anggaran untuk kebijakan yang berkaitan dengan perempuan dilaporkan. Pada tahun 2001 total anggaran yang dialokasikan kepada Kementerian Kesetaraan Gender hanya 0,003% dari jumlah Anggaran tahunan Kementerian (Jung Sook, 2002: 68). Sama halnya, APBN Indonesia mengalokasikan kurang dari 1% dari total program Kementerian Pemberdayaan Perempuan. India telah mengembangkan suatu pendekatan yang berbeda terhadap monitoring *trends* dalam belanja gender yang ditargetkan dengan cara melakukan identifikasi 100% program-program perempuan dan komponen-komponen *pro-women* (ditetapkan 30% penerima manfaat) dari program-program pengentasan kemiskinan. Dokumen-dokumen anggaran nasional sekarang ini memonitor *trends* dalam alokasi-alokasi anggaran dan belanja-belanja aktual untuk kedua jenis belanja tersebut. Anggaran 2007-2008 memperkirakan alokasi anggaran ini sekitar 4,8% dari total Unon Budget dibandingkan dengan 3,8% pada tahun 2006-2007 (Mishra and Jhamb, 2007: 1423).

Sama halnya, pencantuman belanja *Equal Employment Opportunity* (EEO) dan prinsip-prinsip dalam kontrak dan belanja pemerintah, dan implementasinya dalam

Artikel ini termuat dalam bab terakhir buku Sri Mastuti, et.al, *Audit Gender Terhadap Anggaran*, Jakarta: CiBa, 2008.

pengadaan baran dan jasa dan perjanjian-perjanjian *provider*, memiliki kapasitas untuk memperbaiki pengaruh pada belanja pemerintah. Akibatnya, Perancis membuat suatu *yellow budget paper* yang melaporkan program-program pemberdayaan perempuan dan mengukur untuk memperbaiki kesetaraan gender dalam sektor tenaga kerja (UNIFEM, 2002). Dalam kasus Equador, Inisiatif Anggaran Gender Walikota Quito merekomendasikan bahwa 30% kontrak bagi pekerja publik harus ditangani oleh kontraktor perempuan (Pearl, 2002).

Perbaikan pelaporan tentang program-program dimensi pengarusutamaan gender (*non-gender-specific*) sangat krusial, karena ini bisa mencapai 99% dari total anggaran dan dapat mempunyai dampak gender yang cukup berarti, tetapi mereka sering memperhatikan kekurangan telitian dari pada belanja gender yang ditargetkan. RUU Anggaran Swedia 2005 menunjukkan bagaimana *parental leave and part-time work* disatukan/padukan dengan pendapatan anak-anak yang dirugikan dan dasar pensiun dari perempuan dan laki-laki sebagai contoh keluarga. Dalam RUU digambarkan bahwa kerugian pendapatan di atas sepuluh tahun diperkirakan mencapai SEK 304.000 bagi ibu yang lain dibanding dengan SEK 10.000 bagi ayah, yang mana hal itu akan terlihat juga bagi pendapatan pada masa pensiun (*Government of Swedia*, 2006). Di Afrika Selatan, pada anggaran Nasional 1998 secara khusus, melaporkan mengenai dimensi-dimensi gender dari program-program mainstream yang dipilih. Misalnya, anggaran tersebut menilai peranan perempuan dalam program-program penyediaan air minum sebagai karyawan (14%), magang (16%), kontraktor (0%), konsultan (25%) dan anggota *steering committee* (20%). Itu juga menentukan jumlah waktu yang dihabiskan oleh seorang perempuan kota dalam mengumpulkan air karena kurangnya persediaan air (*reticulated water*) (*South African Department of Finance*, 1998).

Diperlukan suatu persesuaian diantara sumber-sumber, dan sasaran dari program-program baru, hukum dan anggaran gender dapat membantu dalam proses tersebut. Misalnya, implementasi UU *South African Domestic Violence* 1999 dibiayai oleh organisasi masyarakat sipil Anggaran Perempuan (Budlender, *et al.*, 2002). Suatu kajian berikutnya oleh sebuah NGO (*Center for Study of Violence and Reconciliation*),

Artikel ini termuat dalam bab terakhir buku Sri Mastuti, et.al, *Audit Gender Terhadap Anggaran*, Jakarta: CiBa, 2008.

menemukan bahwa hampir semua anggaran baru yang dialokasikan untuk pelatihan pegawai pengadilan dan kepolisian sebagaimana disebutkan dalam UU yang baru dan kesadaran publik meningkat karena adanya dukungan dari lembaga donor. Implementasi penuh UU tersebut akan mengharuskan peningkatan alokasi anggaran yang sangat signifikan (Vetten *et al.*, 2005). Di Mexico, penelitian dan advokasi NGO Fundar, Forodan Equidad, menunjukkan tingginya tingkat kematian ibu tanpa ada bantuan sosial yang mempengaruhi implementasi program-program kesehatan ibu (Hofbauer, 2004: 94). Ini membawa peningkatan yang cukup besar (900%) dalam belanja-belanja yang dialokasikan kepada program kesehatan ibu di salah satu negara bagian di Mexico (Bakker dan Budlender, 2008).

Dalam beberapa kasus, ada kesenjangan antara pembayaran dana-dana (pengeluaran) dari anggaran untuk yang mereka rencanakan atau dharapkan mereka. Namun demikian, *gender budgeting* telah memberikan penelusuran dana; khususnya untuk akuntabilitas penganggaran. UNIFEM yang telah mensponsori anggaran gender di India mencakup penelusuran penyimpangan anggaran (tracking) terhadap program-program pengentasan kemiskinan di Bengal Barat (Banerjee & Pouline, 2004). Audit gender dari pengeluaran anggaran dilaksanakan oleh suatu Lembaga Penelitian di Nepal (Acharya, 2006). Organisasi-organisasi Perempuan di Brazil pada tahun 1990-an melakukan penelusuran anggaran terhadap kesehatan dan kekerasan terhadap perempuan. Temuan-temuan mengenai implementasi dan belanja yang masih relatif rendah dipublikasikan. Bersenjatakan informasi ini, organisasi-organisasi perempuan menganjurkan perbaikan-perbaikan dalam alokasi-alokasi anggaran dan belanja dan mendapat tanggapan yang cukup positif dari pemerintah (Raes, 2006).

Gender adalah *cross-cutting issues* dalam program-program pemerintah, sehingga promosi pentingnya kolaborasi *cross-agency* dan pemberian-pemberian program dengan gender responsif gender dapat memperbaiki belanja pemerintah. Republik Pulau Marshall, dalam proyek pilot anggaran gendernya mengusulkan kolaborasi *cross-agency* pada negosiasi-negosiasi awal tahun anggaran 2004 sebagai alat

Artikel ini termuat dalam bab terakhir buku Sri Mastuti, et.al, *Audit Gender Terhadap Anggaran*, Jakarta: CiBa, 2008.

menyelesaikan permasalahan kehamilan anak remaja yang melibatkan kesehatan, pendidikan dan masalah-masalah internal (Sharp dan Vas Dev, 2006).

Memperbaiki mengenai Sisi Pendapatan Anggaran

Sisi pendapatan anggaran merupakan sentral terhadap keputusan-keputusan tentang pelayanan-pelayanan apa yang harus disediakan pemerintah dan siapa yang akan membayar mereka. Akibatnya, pajak (dan pendapatan lainnya) dan belanja harus dipertimbangkan secara seksama guna untuk memahami lebih dalam pengaruh-pengaruh anggaran tersebut. Di negara-negara yang masih tinggi tingkat kemiskinan, kemampuan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan guna memenuhi pelayanan-pelayanan yang memadai yang dapat mengembangkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan bisa saja terhambat. Kemudian, sedikitnya dasar perpajakan yang terjadi dengan konsesi pajak yang signifikan terhadap individu-individu yang memiliki pendapatan dan kesejahteraan yang tinggi, dan perusahaan-perusahaan yang beruntung, bersamaan dengan pengabaikan pajak dan korupsi, dapat merubah beban pendapatan meningkat bagi kelompok-kelompok miskin. Oleh sebab itu, disain pendapatan pajak dan sistem-sistem pajak tidak langsung adalah penting untuk mengembangkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Anggaran Gender telah membawa suatu fokus perubahan-perubahan terhadap peningkatan dimensi-dimensi pendapatan dari anggaran dengan memberikan, antara lain:

1. Melakukan Redisain Sistem Pemberian Pajak: Dengan mengikuti suatu analisa yang dilakukan oleh masyarakat sipil (UK Women's Budget Group), Pemerintah Inggris meredisain kredit pajaknya bagi pekerja perawat anak untuk memastikan bahwa mereka dapat dibayar sebagai seorang *main carer* daripada *main earner* (St Hill, 2002).
2. Melakukan Redisain Pajak Pendapatan Personal: di Australia, Dependant Spouse rebate pemerintah Federal (97% dari penerima laki-laki) diidentifikasi oleh Treasury, dalam Laporan Anggaran Perempuan 1987, karena pada dasarnya tidak mendukung *unpaid childcare providers*, dan dibayar dengan tarif yang lebih tinggi

Artikel ini termuat dalam bab terakhir buku Sri Mastuti, et.al, *Audit Gender Terhadap Anggaran*, Jakarta: CiBa, 2008.

dari pada *sole parent benefit*. *The dependant spouse rebate* dilarang pada tahun 1993 (Sawer, 2002).

3. Melakukan redesain pada pajak-pajak tidak langsung. Prakarsa Anggaran Gender Masyarakat Sipil Afrika Selatan menganalisa pajak-pajak tidak langsung dan menemukan pajak-pajak pada kebutuhan-kebutuhan seperti *paraffin* sangat diperlukan oleh perempuan. Pendapatan pemerintah atas parafin diperkirakan menjadi nol berkat adanya advokasi masyarakat sipil pada tahun 1996. Tentu pembebasan pajak ini akan sangat berpengaruh bagi perempuan miskin karena mereka sangat banyak menggunakan paraffin, tetapi memang tidak begitu berpengaruh bagi keluarga kaya karena mereka tidak banyak menggunakan parafin. Pada tahun berikut, akhirnya pajak parafin dihapuskan (Elson, 2006).

Memperbaiki proses Bantuan Yang Berhubungan dengan Kebijakan

Bantuan (Aid) dapat mengurangi kesenjangan gender dengan memberikan bantuan-bantuan secara langsung, program-program baru dan strategi-strategi pengentasan kemiskinan. Di sejumlah negara, donor-donor bilateral dan multilateral sedang mendukung pelaksanaan inisiatif anggaran gender. Beberapa donor membantu dengan memasukkan program kepekaan gender ke dalam pembaharuan-pembaharuan sistem manajemen belanja publik. Beberapa contoh negara yang sudah melakukan perbaikan-perbaikan dalam pemberian bantuan berkaitan dengan anggaran gender mencakup:

1. Mengintegrasikan isu-isu gender dalam tinjauan belanja publik dan strategi pengentasan kemiskinan. Para pemimpin Masyarakat Sipil Tanzania yang aktif dalam Anggaran Gender memberikan tinjauan belanja publik Tanzania dan membuat strategi-strategi pengentasan kemiskinan dengan cara memasukkan isu-isu gender dalam program (Rusimbi, 2002).
2. Mengintegrasikan Kesetaraan Gender dalam *Aid-fnded projects*. OECD dan Development Assistance Committee memiliki sistem kesetaraan gender (pembuat kebijakan kesetaraan gender) bagi anggota-anggota donor bilateral yang mewajibkan mereka untuk membuat rangking proyek mereka sesuai dengan apakah: (1) kesetaraan gender merupakan suatu sasaran utama (misalnya; pengembangan kapasitas Kementerian Keuangan dan Perencanaan untuk

Artikel ini termuat dalam bab terakhir buku Sri Mastuti, et.al, *Audit Gender Terhadap Anggaran*, Jakarta: CiBa, 2008.

mengintegrasikan sasaran kesetaraan gender dalam strategi-strategi pengentasan kemiskinan. (2) kesetaraan gender merupakan suatu sasaran yang signifikan (misalnya, syarat air minum bagi masyarakat ketika pada waktu yang sama memastikan akses yang sama bagi perempuan). (3) atau Kesetaraan gender tidak termasuk dalam pertimbangan proyek.

3. Memasukkan gender sebagai bagian dari reformasi anggaran yang diberikan oleh para donor. Development Bank mendanai suatu pilot proyek genera muda dan proyek kepekaan gender di Samoa tahun 2003 dengan tujuan untuk meningkatkan pembaharuan pada belanja publik.

KESIMPULAN

Kerangka deskriptif yang dikembangkan memberikan *starting point* dari mana menilai suatu kemajuan anggaran responsif gender. Kerangka tersebut berusaha untuk memberikan kontribusi dengan berfokus secara luas pada kebijakan dan perbaikan-perbaikan sistem penganggaran yang difasilitasi oleh inisiasi-inisiasi ini, mencakup proses dan prosedur, substansi *outputs* yang muncul dari kegiatan-kegiatan pemerintah dan *outcomes* untuk kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan pengentasan kemiskinan.

Pengalaman Internasional menyarankan bahwa anggaran gender telah memberikan sumbangan perbaikan-perbaikan dalam statistik dan indikator, proses pengambilan keputusan dalam anggaran, belanja, pendapatan dan bantuan-yang berkaitan dengan kebijakan. Perbaikan-perbaikan ini mempunyai berbagai bentuk reformasi yang mencerminkan diantara yang lainnya, keberagaman inisiasi anggaran gender sudah bermunculan. Namun demikian, masih banyak penelitian yang harus dilakukan tentang bagaimana cara menilai kemajuan program kesetaraan gender sebagai alat pendanaan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam keuangan publik, termasuk kajian-kajian mendalam inisiasi, perubahan-perubahan yang seringkali berubah dan pengembangan tolak ukur dan indikator-indikator.

Artikel ini termuat dalam bab terakhir buku Sri Mastuti, et.al, *Audit Gender Terhadap Anggaran*, Jakarta: CiBa, 2008.

DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, Meena, 2006, 'Issues and Experience in Engendering the Budgetary Systems in South Asia', paper presented at the 15th Annual Conference on Feminist Economics, University of Sydney AU, 7–9 July.
- Bakker, Isabella & Budlender, Debbie. forthcoming 2008, *Measuring Progress in Financing for Gender Equality and the Empowerment of Women*, Report to UN Commission for the Status of Women, February.
- Banerjee, Nirmala & Roy, Poulina, 2004, *Gender in Fiscal Policies: The case of West Bengal*, UNIFEM, New Delhi.
- Budlender, Debbie, Hicks, Janine & Vetten, Lisa, 2002, 'South Africa: Expanding into Diverse Initiatives', in *Gender Budgets Make More Cents: Country studies and good practice*, eds D Budlender & G Hewitt, Commonwealth Secretariat, London, pp. 152–70.
- Byanyima, Winnie, 2002, 'Parliamentary Governance and Gender Budgeting: The Ugandan Experience', in *Gender Budget Initiatives: Strategies, Concepts and Experiences*, ed. K Judd, UNIFEM, New York, pp. 126–35.
- Diop-Tine, Ngone, 2002, 'Rwanda: Translating Government Commitments into Action', in *Gender Budget Make More Cents: Country studies and good practice*, eds D Budlender & G Hewitt, Commonwealth Secretariat, London, pp. 117–32.
- Elson, Diane, 2002, 'Integrating Gender into Government Budgets within a Context of Economic Reform', in *Gender Budgets Make Cents: Understanding gender responsive budgets*, eds D Budlender, D Elson, G Hewitt & T Mukhopadhyay, Commonwealth Secretariat, London, pp. 23–47.
- Elson, Diane, 2006, *Budgeting for Women's Rights: Monitoring government budgets for compliance with CEDAW*, UNIFEM, New York.
- Govender, Peggys, 2002, 'Lessons from Practice: The Role of Parliament in South Africa's Women's Budget', in *Gender Budget Initiatives: Strategies, Concepts and Experiences*, ed. K Judd, UNIFEM, New York, pp. 113–18.
- Government of Sweden, Ministry of Industry, Employment and Communications, 2006, *Moving Ahead: Gender budgeting in Sweden*, Stockholm.
- Hofbauer Helena, 2002, 'Mexico: Collaborating with a Range of Actors', in *Gender Budgets Make More Cents: Country Studies and Good Practice*. D Budlender & G Hewitt. London, Commonwealth Secretariat. pp. 84–97.

Artikel ini termuat dalam bab terakhir buku Sri Mastuti, et.al, *Audit Gender Terhadap Anggaran*, Jakarta: CiBa, 2008.

Mahbub, Nadeem & Budlender, Debbie, 2007, Gender Responsive Budgeting in Pakistan: Experience and lessons learned www.gender-budgets.org/content/blogcategory/0/144/ accessed March 1, 2008.

Mishra, Ymini & Jhamb, Bhumi, 2007, 'What does the Budget 2007–08 offer women?' *Economic and Political Weekly*, April 21, 2007, pp. 1423–28.

Development Co-Operation Directorate—Development Assistance Committee (DCD-DAC), 2008 'The Gender Equality Policy Marker', www.oecd.org/dataoecd/0/63/37461060.pdf accessed March 5, 2008.

Pearl, Rebecca, 2002, 'The Andean Region: A multi-country programme', in *Gender Budget Make More Cents: Country studies and good practice*, eds D Budlender & G Hewitt, Commonwealth Secretariat, London, pp. 23–42.

Raes, Florence, 2006, *What Can We Expect From Gender-Sensitive Budgets? Strategies in Brazil and in Chile in a comparative perspective*. www.eurosur.org/wide/home.htm

Rusimbi, Mary, 2002, 'Mainstreaming Gender into Policy, Planning and Budgeting in Tanzania', in *Gender Budget Initiatives: Strategies, Concepts and Experiences*, ed. K Judd, UNIFEM, New York, pp. 119–25.

Sawer, Marian, 2002, 'Australia: The Mandarin Approach to Gender Budgets', in *Gender Budget Make More Cents*, eds D Budlender & G Hewitt, Commonwealth Secretariat, London, pp. 43–64.

Sharp, Rhonda. 2003. *Budgeting for Equity: Gender Budget Initiatives within a Framework of Performance Oriented Budgeting*, UNIFEM, New York.

Sharp, Rhonda & Vas Dev, Sanjuga, 2006, Integrating gender into public expenditure: Lessons from the Republic of the Marshall Islands, *Pacific Studies*, 29:3 & 4, pp. 83–105.

Sharp, Rhonda, Vas Dev, Sanjuga & Spoehr, John, 2004, *Final Report: ADB RETA Youth and Gender-Sensitive Public Expenditure Management in the Pacific*, Asian Development Bank, Manilla.

Sook, Yoon Jung, 2002, 'Korea: Raising questions about women-related policies', in *Gender Budget Make More Cents: Country studies and good practice*, eds D Budlender & G Hewitt, Commonwealth Secretariat, London, pp. 65–83.

South African Department of Finance, Republic of South Africa, 1998, *Budget Review 1998*, Pretoria.

Artikel ini termuat dalam bab terakhir buku Sri Mastuti, et.al, *Audit Gender Terhadap Anggaran*, Jakarta: CiBa, 2008.

St Hill, Donna, 2002, 'The United Kingdom: A focus on taxes and benefits', in *Gender Budgets Make More Cents: Country studies and good practice*, eds D Budlender & G Hewitt, Commonwealth Secretariat, London.

Sugiyama, N., 2002, *Gendered Budget Work in the Americas: Selected country experiences*, Department of Government, University of Texas, Austin.

UNIFEM, 2002, *Progress of the World's Women*, United Nations Development Fund for Women, New York.

Vetten, L., Budlender, D. & Schneider, V., 2005, *The price of protection: Costing the implementation of the Domestic Violence Act*. Centre for the Study of Violence and Reconciliation Gender Program. Policy Brief No 02, South Africa.